



**PENYITAAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
ASET NEGARA**

SKRIPSI

**NURUL ANNISA
1810611307**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PENYITAAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM RANGKA PENGEMBALIAN ASET NEGARA**

**NURUL ANNISA
1810611307**

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Desember 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqgurrahman, S.H., M.KN
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 0326106203



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Nurul Annisa

NIM : 1810611307

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penyitaan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi S.H., M.H

Anggota 1

Aji Lukman Ibrahim S.H., M.H

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal Ujian : Rabu, 5 Januari 2022

Anggota 2

Heru Suyanto S.H., M.H. C.L.A

Kaprodi

Taupiqurrahman, S.H., M.KN

BIODATA PENULIS



Nama : Nurul Annisa
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 7 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan H Midi II No. 49 RT01/RW02 Limo, Depok
No. Telepon : 081389543386
Email : nurulannisa@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Indra S. Labilla
b. Ibu : Siti Aminah

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN 01 Pondok Labu, Jakarta Selatan (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPN 96 Jakarta Selatan (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 46 Jakarta Selatan (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Aktif Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Nurul Annisa
NIM : 1810611307
Tanggal : 25 Desember 2021
Tanda Tangan :



Nurul Annisa

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurul Annisa

NIM : 1810611307

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penyitaan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi /jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



Nurul Annisa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : PENYITAAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PENGEMBALIAN ASET NEGARA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dan kontribusi berharga dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Narasumber yang telah membantu banyak untuk skripsi ini dan menjadi panutan saya untuk selaku rendah hati, yaitu Bapak Abvianto Syaifulloh SH, MH.
2. Dosen Pembimbing yang sudah baik dan sabar membimbing, yakni Bapak Heru Suyanto SH, MH.
3. Kedua Orang Tua penulis yang tiada henti untuk mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis, dan terimakasih kepada dua adik tercinta penulis yaitu Najwa dan Iky yang selalu memberikan saya dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu saya dalam perjuangan selama 7 semester untuk menempuh program studi sarjana hukum.

ABSTRAK

Transparency International Indonesia (TII) telah merilis indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan. IPK Indonesia 2020 turun menjadi 37 dari skor 40 pada 2019. Secara peringkat, posisi Indonesia juga melorot dari peringkat 85 menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus dipandang serius dan menjadi koreksi bagi kebijakan pemberantasan korupsi di tanah air. Indonesia saat ini belum tegas dalam memberantas kegiatan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari KPK yang memiliki permasalahan dalam menerapkan UU TPPU dalam kasus korupsi, Misalnya pada kasus Panitera Pengadilan Jakarta Utara, di mana KPK memisahkan antara perkara korupsi dengan TPPU. Padahal UU TPPU juga dapat memaksimalkan pengembalian kekayaan negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah diputuskan pengadilan. Tindak Pidana Pencucian Uang didalam KUHP maupun RKUHP tidak diatur secara khusus dalam suatu bab tersendiri. Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia semakin beragam jenis sehingga upaya pemerintah di Indonesia untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana sering kali dinilai kurang efektif. Oleh karna itu penting untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini agar dapat memaksimalkan ketentuan upaya perampasan aset tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan penyitaan aset dan masih terdapat kelemahan regulasi dalam pengaturan Penyitaan Aset maka dari itu betapa pentingnya pembaruan hukum yang membahas Penyitaan aset sehingga diharapkan proses penyitaan aset serta perampasan aset tindak pidana pencucian uang di Indonesia akan berjalan efektif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, RUU Perampasan Aset, KUHP

ABSTRACT

Transparency International Indonesia (TII) has released the Indonesia's corruption perception index (IPK) in 2020, which experienced a significant decline. Indonesia's 2020 GPA dropped to 37 from a score of 40 in 2019. Rank-wise, Indonesia's position has also dropped from 85 to 102 out of 180 countries measured by its GPA. The decline in the score of Indonesia's Corruption Perceptions Index must be taken seriously and become a correction for policies to eradicate corruption in the country. Indonesia is currently not firm in eradicating criminal acts of corruption, this can be seen from the KPK which has problems in applying the Money Laundering Law in corruption cases, for example in the case of the Registrar of the North Jakarta Court, where the KPK separates corruption cases from money laundering offenses. Whereas the Money Laundering Law can also maximize the return of state assets from corruption cases that have been decided by the court. The crime of money laundering in the Criminal Code and the RKUHP is not specifically regulated in a separate chapter. The crime of money laundering in Indonesia is increasingly diverse, so that the efforts of the government in Indonesia to confiscate assets resulting from criminal acts are often considered ineffective. Therefore, it is important to ratify this Asset Confiscation Bill in order to maximize the provisions on efforts to confiscate assets for the crime of money laundering. This research uses normative juridical legal research methods, namely legal research methods carried out by researching library materials or secondary materials. The problem approach used in this study uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that there are still inhibiting factors in the implementation of asset confiscation and there are still regulatory weaknesses in the regulation of Asset Confiscation, therefore how important it is to reform the law regarding asset confiscation so that it is hoped that the process of confiscation of assets and confiscation of assets for the crime of money laundering in Indonesia will run effectively.

Keywords : Criminal Act, Confiscation of Assets, Criminal Law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORSINILITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS	Iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. RUMUSAN MASALAH	6
I.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN	6
I.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
I. 5 METODE PENELITIAN	7
1. JENIS PENELITIAN.....	7
2. PENDEKATAN MASALAH.....	7
3. JENIS DATA	8
4. TEKNIK ANALISIS DATA	9
BAB II.....	11
II.1 TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU.....	11
II.2. TINJAUAN TEORI	23
BAB III	28
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	28
III. 1 Istilah dan Pengertian Pencucian Uang	28

III. 2 Istilah dan Pengertian Penyitaan dan Perampasan Harta	32
III. 3 Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
BAB IV	38
IV.1. Pelaksanaan Penyitaan Aset Hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang .	38
IV.2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyitaan Aset.....	58
BAB V	67
V.1. KESIMPULAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75